
MODEL PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 KABUPATEN TEBO DALAM PROGRAM SCHOOL OF ENTREPRENEURSHIP UNTUK MENCIPTAKAN SISWA MANDIRI EKONOMI

Inang¹⁾, Siti Hajar Thaitami²⁾, Fajar Agung Mulia³⁾

¹SMK Negeri 8, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

²Prodi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang

³Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bung Hatta

e-mail : ²amithaitami@yahoo.com, ³muliafajaragung@gmail.com

Abstract

Vocational High School as a secondary education institution so far has only been prepared to fill jobs that are not yet created as job creators. While universities which are expected to produce graduates who have the knowledge, skills, creative power and a high level of struggle to open and develop employment opportunities have also not been successful in carrying out their duties. That is because the learning model and / or method used has not been able to internalize the attitude, soul and entrepreneurial character of the students. So far, the entrepreneurship learning methods that take place in vocational schools are generally lectures, the assignment of selling products, and observation. So entrepreneurship education needs to be revitalized which includes; curriculum structuring, the role of the school, organizing the learning process, reforming the teacher to be able to produce graduates who are competitive. Entrepreneurship learning should take place in an inspiring, interactive, challenging, fun, and motivating interaction The learning model that is suitable for the vocational level is the Cooperative learning model Entity Group Model (MGE). MGE is a group learning consisting of interrelated business units. While entrepreneurship learning models that are relevant for the college level are: the method of group projects, lectures, writing essays, case studies, writing business plans, role playing, business simulations, videos, interactions with entrepreneurs.

Keywords: *entrepreneurship education, learning model, entrepreneur*

INTISARI

SMK sebagai lembaga pendidikan menengah selama ini hanya dipersiapkan untuk mengisi lapangan pekerjaan yang ada belum sebagai pencipta lapangan kerja. Sementara perguruan tinggi yang diharapkan penghasil lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, daya kreasi dan daya juang yang tinggi untuk membuka dan mengembangkan lapangan kerja juga belum berhasil menjalankan tugasnya. Hal tersebut disebabkan karena model dan/atau metode pembelajaran yang digunakan belum mampu menginternalisasikan sikap, jiwa dan karakter wirausaha kepada peserta didik. Selama ini metode pembelajaran kewirausahaan yang berlangsung di SMK umumnya ceramah, penugasan menjual produk, serta pengamatan. Sehingga pendidikan kewirausahaan perlu direvitalisasi yang meliputi; penataan kurikulum, peran sekolah, pengorganisasian proses pembelajaran, pembenahan pada diri guru agar mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing. Pembelajaran kewirausahaan hendaknya berlangsung secara interaksi inspiratif, interaktif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi.

Model pembelajaran yang cocok untuk tingkat SMK adalah model pembelajaran koperatif Model grup Entitas (MGE). MGE merupakan pembelajaran secara kelompok yang terdiri dari unit-unit usaha yang saling berkaitan. Sedangkan model pembelajaran kewirausahaan yang relevan untuk tingkat perguruan adalah : *metode group project, lectures, writing essay, case*

study, writing business plan, role playing, business simulation, video, interaction with entrepreneurs.

Kata kunci: pendidikan kewirausahaan, model pembelajaran, entrepreneur

PENDAHULUAN

Globalisasi yang terjadi selama ini telah melahirkan perubahan di segala bidang. Lingkungan organisasi setiap saat berubah pula, sehingga organisasi bisnis dituntut untuk selalu melakukan perubahan dan melakukan adaptasi agar selalu dapat memenangkan persaingan. *Ulrich* (1998) menyatakan bahwa kunci sukses menghadapi sebuah perubahan ada pada sumber daya manusia. Perdagangan bebas yang akan direalisasikan pada tahun 2010 dan 2020 menuntut tersedianya tenaga kerja yang terampil serta memiliki kompetensi yang tinggi untuk bersaing di pasar tenaga kerja, baik regional, nasional dan internasional. Konsekuensinya, lembaga pendidikan formal seperti Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja, memiliki sikap, watak dan perilaku wirausaha serta ketrampilan (*life skill*) untuk bekerja di segala bidang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Umumnya lulusan pendidikan formal hanya ingin mencari pekerjaan dan sangat jarang yang mau dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang. Kenyataan seperti ini mengindikasikan bahwa lembaga pendidikan baru mampu mempersiapkan peserta didik untuk mengisi lapangan kerja yang ada dan belum mampu mempersiapkan mereka menjadi entrepreneur. Bahkan lembaga pendidikan juga belum mampu menghasilkan tenaga yang siap pakai, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, daya kreasi dan daya juang yang dimiliki. Sementara dunia kerja membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, artinya sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya, namun dalam kenyataan tidak banyak tenaga kerja yang siap pakai tersebut. Justru yang banyak adalah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan job yang disediakan. Hal ini harus segera diatasi agar persoalan pengangguran dapat terselesaikan. Salah satu pihak yang berkompeten merubahnya tentu lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. SMK sebagai lembaga pendidikan menengah selama ini hanya dipersiapkan untuk mengisi lapangan pekerjaan yang ada. Semestinya harus bergeser ke penyiapan SDM yang mampu menciptakan lapangan kerja. Sasaran lapangan kerja yang diciptakan tentu berbeda dengan lulusan perguruan tinggi. Lulusan SMK minimal untuk dirinya dan atau orang lain (Usaha Mikro dan Kecil). Hal ini penting, mengingat keinginan pemerintah membuat perbandingan 70 : 30 antara SMK dengan SMA. Kalau tidak diikuti pergeseran SMK sebagai pencipta lapangan kerja berarti pemerintah akan menambah jumlah pengangguran pada kelompok pendidikan menengah. *Mindset* lulusan SMK, harus dirubah dari "lulus mencari pekerjaan" menjadi "lulus SMK menciptakan lapangan pekerjaan" atau menjadi wirausaha. Demikian juga perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, daya kreasi dan daya juang yang tinggi untuk membuka dan mengembangkan lapangan kerja di samping siap mengisi lowongan yang ada secara profesional.

Kegagalan pendidikan menghasilkan alumni yang siap pakai dan yang berjiwa entrepreneur berdampak pada tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data BPS, jumlah penganggur total pada Februari 2008 telah tercatat sebesar 9,43 juta orang atau 8,46% dari jumlah angkatan kerja sebesar 111,48 juta orang.

PEMECAHAN MASALAH

Implikasi Logis dan Praktis Pendidikan Kewirausahaan

Pendidikan kewirausahaan, dilihat dari siapa yang bertanggung jawab banyak pendapat mengatakan bahwa pendidikan kewirausahaan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, karena itu pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan pendidikan kita terdiri atas tiga bagian. Pertama, pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah) dan nonformal (masyarakat). Pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dilihat dari sasaran yang ingin dicapai, sasaran pendidikan adalah pembentukan aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap mental atau moral) dan psikomotorik (skill/keterampilan). Pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dilihat dari sasaran yang ingin dicapai, sasaran pendidikan adalah pembentukan aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap mental atau moral) dan psikomotorik (skill/keterampilan). Pada umumnya sekolah sebagai lembaga pendidikan dan merupakan pusat kegiatan belajar mengajar dijadikan tumpuan dan harapan orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah. Karena itu, sekolah senantiasa memberikan pelayanan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pembentukan sikap dan keterampilan bagi peserta didik termasuk sikap mental wirausaha. Dalam praktik di sekolah, untuk mampu menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada peserta didik ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

1) Pembinaan dalam Kurikulum

Pembinaan kurikulum dalam rangka menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan yang mampu membentuk sikap dan karakter wirausaha pada peserta didik dapat dilakukan dengan cara melengkapi materi kurikulum yang telah ada dengan bidang studi kewirausahaan khususnya di SMK, dan mengintegrasikan nilai-nilai wirausaha kedalam silabus dan RPP. Di perguruan tinggi memberikan mata kuliah kewirausahaan dengan orientasi yang jelas pada pembentukan jiwa dan karakter wirausaha mahasiswa dan kesiapan untuk berwirausaha.

2) Peningkatan Peran Sekolah dalam Mempersiapkan Wirausaha

Dalam menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan pada diri peserta didik diperlukan peran sekolah secara aktif. Misal, guru akan menerapkan integrasi nilai kreatif, inovatif, dan berani menanggung resiko dalam pembelajaran kompetensi dasar produksi, konsumsi, dan distribusi.

3) Pembinaan Pengorganisasian Proses Pembelajaran

Mengembangkan organisasi pengalaman belajar peserta didik adalah pembelajaran yang berbasis unit produksi. Misalnya pada pembelajaran materi produksi, anak dilatih keterampilan untuk memproduksi. Hasil produksi mereka digunakan sebagai latihan menjual pada saat belajar materi distribusi.

4) Proses Kelompok Belajar

Guru dituntut untuk berusaha dan mampu mengadakan modifikasi-modifikasi terhadap proses-proses kelompok peserta didik di dalam kelas agar tumbuh kembang nilai-nilai kewirausahaan pada diri peserta didik. Contoh: pembentukan diskusi kelompok memperlihatkan heterogenitas di dalam kelompok. Dalam sebuah kelompok sebaiknya terdiri dari peserta didik yang mempunyai ide-ide kreatif, peserta didik yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, peserta didik yang pasif. Dengan kombinasi yang beragam diharapkan terjadi perpaduan pengalaman belajar yang berdampak pada setiap peserta didik.

5) Pembinaan Diri Guru

Peran guru adalah mengkomunikasikan potensi dan cita-cita secara jelas sehingga dapat menginspirasi setiap peserta didik untuk dapat melihat jiwa kewirausahaan dalam dirinya.

KAJIAN TEORI

Kewirausahaan

Kewirausahaan pada hakekatnya merupakan sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif (Suryana, 2000). Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan "*Entrepreneurship*", dapat diartikan sebagai "*the backbone of economy*", yang adalah syaraf pusat perekonomian atau pengendali perekonomian suatu bangsa

(Soeharto Wirakusumo, 1997:1). Secara epistemologi, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur internal yang meliputi kombinasi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan semangat dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha. Wirausahawan adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung resiko, yang memiliki visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. **Perkembangan Kewirausahaan** Dalam perkembangannya, sejak awal abad 20, kewirausahaan sudah diperkenalkan di beberapa negara, seperti Belanda dengan istilah "*ondernemer*", dan Jerman dengan istilah "*unternehmer*". Di negara-negara tersebut, kewirausahaan memiliki tugas yang sangat banyak antara lain adalah tugas dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepemimpinan teknis, kepemimpinan organisatoris dan komersial, penyediaan modal, penerimaan dan penanganan tenaga kerja, pembelian, penjualan, pemasangan iklan dan sebagainya.

Pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen, yang menurut Soeharto Prawirokusumo adalah dikarenakan oleh:

- 1) Kewirausahaan berisi "*body of knowledge*" yang utuh dan nyata (*distinctive*), yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap.
- 2) Kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi "*venture start up*" dan "*venture growth*". Hal ini jelas tidak masuk dalam "*frame work general management courses*" yang memisahkan antara "*management*" dengan "*business ownership*".
- 3) Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda
- 4) Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

Dengan memiliki jiwa/corak kewirausahaan, maka birokrasi dan institusi akan memiliki motivasi, optimisme dan berlomba untuk menciptakan cara-cara baru yang lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel, dan adaptif. **Azas dalam Pengajaran Kewirausahaan** Beberapa azas dan prinsip yang seyogyanya kita pegang teguh dalam mengelola pengajaran kewirausahaan ini di antaranya adalah:

a. Pengakuan dan pelaksanaan azas Humanistik, yang mana kita harus mengakui dan melaksanakan prinsip bahwa:

- 1) Setiap siswa merupakan manusia utuh dan memiliki potensi yang bersifat menyeluruh, baik jasmani maupun rohani.
- 2) Setiap siswa memiliki kebutuhan seperti menurut pendapat Rouche, yaitu kebutuhan fisik (lelah), mengemukakan pendapat, dihargai, mendapatkan kejelasan, berbicara dan sebagainya.
- 3) Suasana belajar yang manusiawi akan mampu melibatkan semua aspek taksonomi, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik siswa. Suasana manusiawi yang dimaksud adalah suasana kekeluargaan, hangat, terbuka, obyektif, jujur dan bebas dari segala bentuk paksaan apapun juga.

b. Metode pembelajaran yang bersifat "*siswa centris*" haruslah berdasarkan atas ketuntasan belajar dari setiap siswa. Guru wajib bersikap *value based* (memiliki pegangan/aturan) dan wajib memiliki target dari setiap materi yang diajarkan. Tanpa acuan ini, maka proses pembelajaran akan menjadi tidak terarah, dan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai.

c. Dalam pengajaran kewirausahaan dibutuhkan kemampuan guru dalam membangkitkan daya kreativitas dan inovasi yang dimiliki siswa. Penampilan, sikap, kepribadian dan penguasaan guru akan proses pembelajaran akan sangat menentukan keterlibatan dan keterikatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, sebagai tahap dari penggalan nilai-nilai kreativitas dari dalam diri siswa.

d. Metoda pembelajaran hendaknya disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami, diresapi dan dihayati siswa. Guru hendaknya mampu mengubah konsep materi ke dalam bahasa siswa, atau dalam bentuk penerapan pada gejala kehidupan riilnya. Sehingga diharapkan materi sajian teoritik keilmuan dapat diubah menjadi stimulus yang merangsang aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa

Pola Penyelenggaraan Pemelajaran Mata Diklat Kewirausahaan

- 1) Penanaman Sikap
- 2) Penanaman sikap dilakukan melalui pembiasaan dan pemberanian melakukan sesuatu. Kadang-kadang harus melalui “tekanan”, “keterpaksaan” dalam arti positif antara lain dengan cara pemberian batas waktu (*deadline*)
- 3) Pembukaan Wawasan, dilakukan melalui kegiatan seperti:
 - a. ceramah, diskusi, mengundang lulusan SMK yang berhasil, mengundang wirausahawan yang berada di sekitar sekolah agar menceritakan keberhasilan dan kegagalan yang pernah mereka alami atau mengunjungi perusahaan;
 - b. pengamatan langsung melalui pemagangan atau studi banding.
- 4) Pembekalan Teknis
- 5) Bertujuan memberi bekal teknis dan bermanfaat bagi perjalanan hidup anak didik, bukan ilmu yang muluk-muluk
- 6) Pembekalan pengalaman awal

Konsep Kemitraan

Menurut Saroni (2009) kemitraan sistem kerja adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh sekolah dengan DU/DI dengan cara mendapatkan pekerjaan sebagai sarana pelatihan-an anak didik dari DU/DI beserta bahan yang digunakan untuk membuat barang atau pekerjaan yang dimaksudkan. Pada sistem kerjasama ini, DU/DI mempunyai akses langsung pada pekerjaan sehingga untuk hal tersebut, maka instruktur harus mengikuti pelatihan atau pemahaman atas ketentuan-ketentuan yang diberlakukan terhadap pekerjaan tersebut. Pihak DU/DI menyerahkan pekerjaan, baik bahan maupun jenisnya kepada sekolah, instruktur. Selanjutnya instruktur yang melakukan pendampingan pada anak didik selama melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut. Instruktur memeriksa dan sekaligus menjadi *quality control* bagi barang hasil pekerjaan anak didik. Untuk hal tersebut, maka guru, instruktur harus benar-benar kompetens terhadap bidangnya tersebut. Selanjutnya, setelah pekerjaan selesai dikerjakan, maka pihak sekolah mendapatkan dana pembinaan atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di bengkel sekolah tersebut. Jumlah imbalan yang didapatkan sebenarnya bukanlah satu-satunya orientasi bagi sekolah sebab tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan bagi anak didik untuk menerapkan keterampilan yang didapatkan dari proses pembelajaran pada kondisi kerja. Oleh karena itulah, maka selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah pengaturan imbalan yang didapatkan sekolah dari DU/DI yang memberikan pekerjaan bagi mereka. Imbalan tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga anak didik juga mendapatkan bagian dari imbalan kerja tersebut. Anak didik diberi bagian adalah sebagai pemicu dan pemacu semangat kerja sehingga dengan demikian, secara langsung mereka menerapkan segala teori dan materi praktiknya di pekerjaan nyata. Dengan bagian imbalan dana, maka anak didik akan terpacu untuk lebih serius dalam mengerjakan pekerjaan. Mereka akan berusaha memperbaiki kinerja dan hasil kerjanya.

Kemitraan kerja adalah bentuk kerja sama antara sekolah dengan DU/DI yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang diberikan oleh DU/DI kepada sekolah. Dalam hal ini DU/DI hanya memberikan pekerjaan pada sekolah sedangkan material atau bahan untuk membuat benda kerja disediakan oleh pihak sekolah. Kemitraan ini dapat dikatakan kemitraan renggang sebab pihak DU/DI tidak ikut bertanggungjawab jika terjadi kesalahan pada hasil kerja. Bagi pihak DU/DI, begitu pekerjaan disepakati, maka segala urusan terkait dengan proses kerja merupakan tanggungjawab sekolah. Pihak DU/DI hanya mengetahui bahwa pekerjaan selesai sesuai dengan target waktu dan kualitasnya. Jika ada barang rusak, maka menjadi tanggungan sekolah. Kondisi seperti ini merupakan sebuah kesempatan bagi sekolah, dalam hal ini guru pendamping kegiatan untuk mengkondisikan anak didiknya sebagai pelaku kerja profesional. Artinya sekolah dalam memosisikan anak sebagaimana seseorang yang sedang bekerja. Hal ini menjadi sangat penting sebab dengan demikian, maka terbuka kesempatan bagi anak didik untuk mendapatkan pengalaman kerja produk untuk masyarakat. Dengan menerapkan kondisi sebagaimana sebuah pabrik atau dunia usaha sedang melaksanakan tugasnya, maka setidaknya anak didik akan terbiasa untuk terus dalam kondisi standar untuk bekerja. Pengalaman inilah yang sebenarnya sedang kita buru saat kita menerima kerjasama dengan DU/DI. Kita ingin memberikan pengalaman bekerja pada anak didik sehingga pada saatnya mereka tidak kaget jika harus bekerja. Pada kemitraan kerja seperti ini, hal utama yang hendak kita capai adalah

bertambahnya pengalaman anak didik serta kesadaran anak didik terhadap kondisi kerja dan menumbuhkan rasa bertanggungjawab atas pekerjaan yang harus diselesaikan. Hal ini sangat penting sebab

Model Pengembangan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Menciptakan Kemandirian Sekolah (Abdul Hakim) dengan cara seperti ini, maka dapat menumbuhkan pola kerja sistematis serta efektivitas kerja yang maksimal dari anak didik dan menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaannya sepanjang hidup. Untuk dapat melakukan kerja sama atau kemitraan kerja ini, maka pihak sekolah seharusnya berperan aktif untuk melakukan pendekatan kepada DU/DI. Pendekatan ini bertujuan untuk dapat memperoleh kepercayaan dari DU/DI dalam hal mengerjakan atau menangani satu atau beberapa pekerjaan di sekolah. Sekolah harus aktif menghubungi DU/DI dan meyakinkannya bahwa pihak sekolah, melalui kegiatan kerja di bengkel sekolah atau pada proses kegiatan pembelajaran praktik di bengkel sekolah mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan standar industri atau standar produksi layak jual bagi kebutuhan masyarakat. Begitulah, sekolah melakukan kemitraan dengan DU/DI sebagai bentuk tanggungjawab pada pembelajaran anak didik, yaitu mempersiapkan anak didik sebagai tenaga terampil, siap kerja.

Kemitraan umum, kemitraan lepas merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan murni atas inisiatif sekolah. Artinya sekolah membuat program kerja produksi barang dan selanjutnya barang produk tersebut ditawarkan ke DU/DI. Seluruh hal terkait dengan pembiayaan, ditanggung oleh sekolah. Untuk melakukan kemitraan ini, maka di sekolah harus dibentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan analisa kebutuhan masyarakat atas barang-barang kebutuhan hidup. Tim inilah yang harus menumbuhkan pola kreativitas anak didik ataupun para guru untuk selalu menemukan materi atau jenis barang yang sedang booming di masyarakat. Selanjutnya sekolah melalui kegiatan pembelajaran praktik harus membuat barang-barang tersebut sebagai contoh. Pada awalnya sekolah harus membuat beberapa saja dan selanjutnya barang hasil kerja anak didik tersebut ditawarkan kepada DU/DI untuk dibuatkan nota kesepakatan atau nota kesepahaman untuk melaksanakan proses pembuatan barang tersebut. Dalam bentuk kemitraan lepas ini, sekolah menjadi sumber inspirasi bagi proyek kerja yang hendak dilaksanakan. Bentuk dan macam barang yang diproduksi direncanakan oleh pihak sekolah yang didasarkan pada tingkat kebutuhan di masyarakat. Atau merupakan hasil perekayasaan atas barang yang sudah ada di masyarakat dengan perbaikan fungsi dan kondisi se-hingga mempunyai tingkat kebaikan yang lebih dari barang yang sudah ada. Dengan kemitraan jenis ini, maka posisi sekolah dengan DU/DI adalah setara sehingga sekolah dapat membuat kebijakan khusus pada isi kesepakatan atau kesepahaman. Artinya pihak sekolah mempunyai hak yang sama dengan pihak DU/DI. Tetapi, untuk jenis kemitraan seperti ini memang sangatlah berat bagi sekolah sebab untuk membangkitkan kreativitas guru atau anak didik se-hingga dapat memikirkan atau menemukan rancangan barang yang dibutuhkan masyarakat merupakan hal yang sulit.

Pada dasarnya, konsep kemitraan lepas merupakan konsep kerjasama dengan memaksimalkan kerja Pokja UPJ, Unit Produksi dan Jasa yang ada di sekolah. Dengan konsep kemitraan ini, maka peranan UPJ menjadi sedemikian rupa sehingga dapat menjadi embrio perusahaan yang berbasis sekolah. Sebenarnya, SMK mempunyai kesempatan untuk menjadi sebuah per-usahaan sesuai dengan bidang studi dan program keahlian yang dikelola di sekolah. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa SMK mengelola, menyiapkan dan mengarahkan anak didik menjadi tenaga kerja yang siap bekerja. Jika ini dapat diwujudkan, maka biaya pendidikan yang harus dibayar oleh orangtua dapat lebih ringan sebab anak didik mendapatkan tambahan dana dari pekerjaan yang di bengkel sekolah. Pada konsep ini, setidaknya ada 2 (dua) hal yang didapatkan oleh sekolah dan anak didik, yaitu pengalaman menangani pekerjaan dan *income* bagi kelancaran proses pembelajaran. Dua hal ini merupakan kondisi penting yang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi sekolah dan anak didik untuk dapat melatih disiplin kerja sejak awal. Jika kondisi ini dapat diciptakan, maka untuk selanjutnya, masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk pendidikan anak-anaknya. Konsep kemitraan lepas memang merupakan konsep yang mengarah pada persiapan sekolah sebagai basis usaha produktif sekolah. Ini merupakan bentuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh sekolah dengan meng-efektifkan pembelajaran praktik sebagai kegiatan yang dapat memproduksi barang layak pakai bagi masyarakat.

Barang-barang yang dihasilkan dalam proses pembelajaran praktik inilah jika dipasarkan ke masyarakat, maka selanjutnya dapat dijadikan sebagai dana sharing bagi pendidikan anak didik.

Pada kenyataannya, kita memang sangat membutuhkan eksistensi konsep kemitraan sebagai bentuk kerjasama antara sekolah dengan DU/DI sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas *branding* dari sekolah di masyarakat. Kita harus memperbaiki kondisi yang selama ini dikatakan tidak efektif. Dimana, anak-anak lulusan sekolah kejuruan ternyata belum siap menghadapi kenyataan hidup. Pada saat mereka bekerja, ternyata belum mempunyai kemampuan sebagaimana yang diharapkan dari pekerjaan mereka. Kondisi ini jelas sangat menguntungkan bagi sekolah sebab mampu menjadi sarana untuk memperbaiki citra sekolah. Jika sekolah mampu mem-berikan kegiatan produktif bagi anak didiknya dan selanjutnya berdasarkan hasil kegiatan produktif tersebut dapat dijadikan sebagai sharing dana pen-didikan bagi anak didik, tentunya orangtua, masyarakat memberikan respon positif pada sekolah. Kita membutuhkan respon positif dari masyarakat agar upaya peningkatan dan pengembangan sekolah sebagai ajang pembekalan keterampilan anak didik benar-benar maksimal, dalam model pembelajaran di dalamnya ada strategi pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, posisi hierarkis dari masing-masing istilah tersebut, divisualisasikan pada Gambar berikut:



Gambar 1. Hirarki model pembelajaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang guru dalam mengajar menggunakan pendekatan, selanjutnya guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya diperlukan berbagai metode pembelajaran yang relevan. Menurut Sanjaya (2009) metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya: (1) ceramah; (2) tanya jawab; (3) demonstrasi; (4) diskusi; (5) simulasi; (6) laboratorium; (7) pengalaman lapangan/observasi; (8) brainstorming; (9) debat, (10) seminar dan sebagainya. Dengan demikian, metode dalam sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting dan strategis. Untuk itu setiap guru harus mampu memilih dan menerapkan metode yang relevan dengan materi yang disampaikan. Ketepatan dalam mendesain model pembelajaran para pengajar akan mengantarkan tercapainya pembangunan insan cerdas komprehensif atau seutuhnya sebagaimana yang

ditegaskan dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), bahwa yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Setiap model pembelajaran yang ada mempunyai karakteristik masing-masing yang mencakup kekuatan dan kelemahannya. Penggunaan model harus memperhatikan perbedaan setiap individu peserta didik yang merupakan kodrat manusia yang bersifat alami.

Pemilihan metode dalam model pembelajaran merupakan suatu hal yang penting agar pembelajaran tidak mengarah pada apa yang disebut oleh Ravitch dalam Puskur (2010) sebagai *“teaching to the test”* atau mengajar yang dirahkan untuk menghadapi soal-soal ujian. Bahaya *“teaching to the test”* menurut Ravitch adalah *teachers tend to teach what is tested. Teaching to the test is bad in current practice because so many tests ask narrow questions about disconnected of information, thus leading teacher to drill their student on right answer rather than to teach a deep understanding of the concepts involve.*

Pembelajaran harus aktif berorientasi pada peserta didik, menyenangkan, partisipatif. Keterlibatan peserta didik sangat penting, peserta didik yang *“melakukannya”*, memecahkan masalahnya sendiri, menemukan contoh-contoh, mencoba keterampilan-keterampilan.

Berdasarkan pengalaman belajar secara aktif peserta didik akan mampu mengkonstruksikan apa yang telah diperolehnya. Pembelajaran seperti ini akan lebih bermakna dan mampu menciptakan insan yang cerdas komprehensif.

Model Pembelajaran Kewirausahaan

Tujuan pembelajaran kewirausahaan adalah bagaimana menginternalisasikan sikap, jiwa dan karakter wirausaha dalam diri anak didik dan mampu mengaktualisasikannya dalam bentuk pendirian dan pengembangan usaha. Tentu keberhasilan pembelajaran kewirausahaan akan sangat tergantung dengan bagaimana cara mengajarnya. Cara mengajar ini berarti metode yang dipilih. Pembelajaran kewirausahaan hendaknya berlangsung secara interaksi inspiratif, interaktif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi (I2M3). Pembelajaran kewirausahaan harus mampu mengembangkan jiwa inspiratif anak didik. Anak yang inspirasinya berkembang akan mudah menemukan ide-ide usaha. Dalam berwirausaha ide sesuatu yang sangat penting. Ide-ide usaha atau proyek tidak muncul begitu saja, memang ada orang yang memiliki segudang ide, akan tetapi orang lain merasa kesulitan menemukan ide. Pembelajaran harus berlangsung secara interaktif antar sesama siswa/mahasiswa, dengan guru/dosen. Kemudian harus dirancang dengan penuh tantangan untuk membiasakan mereka menghadapi tantangan. Karena dalam dunia usaha yang sesungguhnya penuh dengan tantangan yang harus mampu dilalui, kalau tidak usaha akan gagal. Di samping itu pembelajaran kewirausahaan harus berlangsung secara menyenangkan agar peserta didik tertarik, dan mampu memunculkan motivasi untuk belajar lebih giat lagi dan yang terpenting lagi keinginan untuk berwirausaha kelak. Calon wirausaha yang ingin dihasilkan adalah yang tangguh, rasional, dan mementingkan kebersamaan. Artinya seorang wirausaha yang tidak ingin maju sendirian, harus maju bersama orang/usaha lain di sekitarnya. Kemajuan yang diraih tidak dengan mengorbankan orang lain dengan cara-cara yang keji. Model pembelajaran yang dianggap relevan untuk tingkat SMK adalah model pembelajaran kooperatif yang disebut Model grup Entitas (MGE). MGE merupakan pembelajaran secara kelompok yang terdiri dari unit-unit usaha yang saling berkaitan. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok usaha yang berbeda dan saling berkaitan dan membutuhkan. Dasar filosofisnya adalah semua orang ingin berhasil dan makmur, akan tetapi kemampuan, kesempatan setiap orang berbeda-beda.

Sehingga untuk mencapainya harus secara bersama-sama dengan usaha lain dengan prinsip saling menguntungkan. Langkah-langkah pembelajaran MGE sebagai berikut : (1) menjelaskan tujuan model pembelajaran, (2) siswa dibagi dalam kelompok-kelompok usaha yang dipilih siswa atau guru, (3) setiap kelompok merancang usaha (berisi perencanaan, menjalankan usaha dan pengembangannya, usaha yang dirancang harus saling berhubungan dengan perusahaan/kelompok lain, hubungannya bisa hirarkis (saling melengkapi) atau horizontal (usaha setara dan saling membutuhkan), (4) setiap kelompok melakukan simulasi.

KESIMPULAN

SMK sebagai lembaga pendidikan menengah selama ini hanya dipersiapkan untuk mengisi lapangan pekerjaan yang ada. Semestinya harus bergeser ke penyiapan SDM yang mampu mencitakan lapangan kerja minimal untuk dirinya. Demikian juga perguruan tinggi belum mampu menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, daya kreasi dan daya juang yang tinggi untuk membuka dan mengembangkan lapangan kerja. Pembelajaran kewirausahaan selama ini belum mampu menginternalisasikan sikap, jiwa dan karakter wirausaha kepada anak didik dan belum mampu menghasilkan entrepreneur. Model pembelajaran yang digunakan guru, minim variasi dan tidak banyak yang menyentuh penggunaan model yang mengarah pada pembentukan nilai-nilai (afeksi). Model pembelajaran kewirausahaan di SMK umumnya ceramah, model penugasan menjual produk, serta model pengamatan. Akibatnya pendidikan kewirausahaan di Indonesia gagal menghasilkan entrepreneur dan hanya menghasilkan “tukang” dan pemikir saja”. Sehingga perlu dipertimbangkan penggunaan pembelajaran kooperatif Model grup Entitas (MGE) untuk SMK dan untuk perguruan tinggi dengan alternatif metode *group project, lectures, writing essay, case study, writing business plan, role playing, business simulation, video, interaction with entrepreneurs*.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal :

- Hakim, Abdul. "Model pengembangan kewirausahaan sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam menciptakan kemandirian sekolah." *Jurnal* 4.1 (2010).
- Sofia, Irma Paramita. "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) sebagai gagasan inovasi sosial bagi pembangunan perekonomian." *WIDYAKALA JOURNAL* 2.1 (2017): 2-23.
- Rasul, Djuharis. "Pelaksanaan pendidikan karakter, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan dalam belajar aktif di SMK." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 19.1 (2013): 77-93.
- Winarno, Agung. "Pengembangan model pembelajaran internalisasi nilai-nilai kewirausahaan pada sekolah menengah kejuruan di Kota Malang." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 14.2 (2009): 124-131.

Buku :

- Hisrich, Robert D. dan Peters, Michael P. 2002. *Entrepreneurship, International Edition*, Fifth Edition: McGraw-Hill Higher Education.
- Instruksi Presiden RI No. 4 Th. 1995 *tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan*. Jakarta.
- Priyanto, dkk. 2010. *Penyusunan Model Pendidikan Kewirausahaan untuk Level Pendidikan Formal dan Non Formal, (Laporan Hibah Bersaing)*, Univ. Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Puskur. 2010. *Bahan Pelatihan: Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa, Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*, Jakarta, Balitbang Pusat Kurikulum, Kemendiknas.

Sanjaya, Wina. 2009. *Strategi pembelajaran Berorientasi pada Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suryana. 2003. *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.

Skripsi/tesis/disertasi:

Rahayu, Wening Patmi. 2008. Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal, Intensitas Pendidikan Ekonomi Keluarga dan Pembelajaran Kewirausahaan Terhadap Motivasi Usaha dan Sikap Kewirausahaan, *Disertasi*. tidak diterbitkan. Malang : PPS UM.

Internet:

BPS. 2013. *Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama, 2004 – 2013*,(online),http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06¬ab=3, diakses 28 Agustus 2013.

BPS. 2013. *Pengangguran Terbukan Menurut Pendidikan yang Ditamatkan*, (online),http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06¬ab=4, diakses 28 Agustus 2013